

Motif Jepang Merekonstruksi *Trans Pacific Partnership* (TPP) Pasca Pengunduran Keanggotaan Amerika Serikat Tahun 2017

Alen Tiara

Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
alen.tiara@yahoo.com

Abstract

This article provides an explanation of Japanese motives that reconstructed the Trans Pacific Partnership Agreement (TPP), after the United States's departure from membership in 2017. Since the end of the Cold War era, Japan became a shadow state that follows the United States in carrying out its foreign policy. And then, under President Donald Trump's protectionist policy, the United States became a country that had the principle of unilateralism and decided to leave the TPP Agreement. Responding this phenomenon, Japan then initiated the reconstruction of the TPP Agreement and then became the leader in the formation of a new agreement in the form of a Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership (CPTPP). This Japanese identity changes towards the Asia Pacific region are certainly based on the structure of the idea of free trade which later formed Japan's economic in the form of increasing exports and politics in increasing Japan's global role in the Asia Pacific region.

Key Words: *Free Trade, Trans Pacific Partnership, Interest.*

Abstrak

Artikel ini memberikan penjelasan mengenai motif Jepang merekonstruksi Perjanjian *Trans Pacific Partnership* (TPP), pasca keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan tetap pada tahun 2017. Sejak berakhirnya era Perang Dingin Jepang seringkali menjadi negara kedua yang mengikuti Amerika Serikat dalam menjalankan politik luar negerinya. Akan tetapi dibawah kebijakan proteksionisme Presiden Donald Trump, Amerika Serikat menjadi negara yang memiliki prinsip unilateralisme dan memutuskan untuk keluar dari Perjanjian TPP. Untuk menanggapi fenomena tersebut, Jepang kemudian menginisiasi perekonstruksian Perjanjian TPP dan kemudian menjadi *leader* dalam pembentukan perjanjian baru berupa *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership* (CPTPP). Perubahan identitas Jepang dalam kawasan Asia Pasifik tentu didasari pada struktur ide perdagangan bebas yang kemudian membentuk kepentingan ekonomi berupa peningkatan ekspor dan politik dalam meningkatkan peran global Jepang di kawasan Asia Pasifik.

Kata Kunci: *Perdagangan Bebas, Trans Pacific Partnership, Kepentingan.*

PENDAHULUAN

Jepang merupakan sebuah negara unik dengan karakteristik masyarakat yang homogen di benua Asia. Walaupun secara geografis negara titisan dewa matahari ini dikategorikan sebagai bagian dari Asia, namun sebenarnya ia terletak terpisah dari daratan utama benua Asia. Selain letak geografis yang sedikit berbeda dengan negara Asia lainnya, karakter unik lain yang dimiliki Jepang adalah memiliki dua persepsi mengenai kapasitas nasionalnya sebelum dan sesudah Perang Dunia II. Sebelumnya Jepang memandang negaranya sebagai negara kuat yang mampu meningkatkan kemakmuran nasional serta memperkuat pertahanan dengan membangun militer yang kuat. Akan tetapi setelah mengalami kekalahan pada Perang Dunia II, Jepang memandang dirinya sebagai negara yang kuat apabila berhasil membangun sektor ekonomi yang kuat pula (Takashi & Jain, 2000, hlm. xiv).

Hal tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh sanksi internasional atas kealahannya pada Perang Dunia II, Jepang kemudian diduduki secara *de facto* oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan militer Jenderal Mc Arthur (Tjeng, 1983, hlm. 363). Hingga tahun 1950, Jepang tidak dapat benar-benar menjalankan politik luar negerinya, bahkan menjadi pangkalan utama bagi Amerika Serikat untuk membendung pengaruh komunisme di Asia yang dibawa oleh Rusia dan China pada era Perang Dingin berlangsung. Jepang menjadi negara “*little brother*” bagi Amerika Serikat yang kemudian memiliki sifat pasifis, yaitu nilai anti militerisme dan hanya berperan sebagai pangkalan penting Amerika Serikat bagi penyebaran pengaruh kapitalisme di Asia (Akaha & Langdon, 1993, hlm. 68).

Namun dalam perkembangannya pada tahun 1951

melalui Perjanjian Damai San Fransisco, Jepang yang dinyatakan kembali merdeka dengan pembatasan penggunaan persenjataan dan militer aktif oleh internasional, kemudian mulai merumuskan kebijakan nasionalnya yang dikenal sebagai *fukoku kenzai*, yang berarti komitmen Jepang untuk lebih memperhatikan sektor ekonomi dan tidak terlalu melibatkan diri dalam aspek politik internasional (Tjeng, 1973, hlm. 428). Sehingga Jepang tumbuh menjadi negara yang meminimalisir konfrontasi politik dan memiliki fokus besar terhadap revitalisasi perekonomian yang didasarkan kepada kekuatan sumber daya masyarakatnya dengan perlindungan keamanan dari Amerika Serikat. Karena berdasarkan sejarahnya pun Jepang dahulunya merupakan salah satu negara yang memiliki basis perekonomian besar di kawasan Asia, namun setelah mengalami kekalahan pada Perang Dunia II pada tahun 1945, Jepang kemudian merubah arah kebijakannya yang semula bersifat militeristik menjadi lebih pasifis (Tjeng, 1983, hlm. 332-333).

Bahkan hingga kini Jepang tumbuh menjadi negara yang menjalin aliansi dengan Amerika Serikat untuk memperkuat sektor keamanan dan tidak meningkatkan kapabilitas militer aktif agar mendapatkan kepercayaan kembali dari dunia internasional, khususnya negara-negara Asia. Jepang dapat mengubah pencitraan negatif terkait praktik ekspansionismenya saat Perang Dunia II dengan memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan Amerika Serikat. Hubungan ini tidak hanya direlisasikan melalui kerja sama pertahanan, namun juga di bidang ekonomi yang terwujud dalam kemitraan perdagangan bebas multilateral *Trans Pacific Partnership* (TPP). Bergabung dengan keanggotaan perjanjian TPP merupakan wadah

untuk mendapatkan dua keuntungan sekaligus bagi Jepang, yaitu membangun relasi lebih intens dengan Amerika Serikat dan mendapatkan keuntungan ekonomi bagi dalam negerinya.

Perjanjian Kemitraan Trans Pasifik merupakan sebuah pengembangan dari kerja sama kemitraan sebelumnya yang bernama *Trans Pacific Strategic Economic Partnership* (TPSEP). Perjanjian Kemitraan Ekonomi Strategis Trans-Pasifik (TPSEP atau P4) ini pada awalnya diinisiasi oleh lima negara anggota *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), yaitu Amerika Serikat, Australia, Singapura, Chili, dan Selandia Baru, pada tahun 1990-an. Pembahasan mengenai urgensi adanya Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Agreement*) khusus untuk kawasan Asia Pasifik menjadi topik utama yang dibicarakan oleh kelima negara tersebut di setiap sesi non-formal dalam Forum Ekonomi Kerja Sama Asia Pasifik APEC (Elms, 2012, hlm.1-3).

Namun setelah melewati beberapa perundingan non-formal, Amerika Serikat dan Australia menarik diri sementara dari keinginannya untuk bergabung dalam kesepakatan kerjasama tersebut. Rancangan perjanjian kemitraan dalam hal perdagangan ini kemudian hanya dilanjutkan oleh Singapura, Chili, dan Selandia Baru dari tahun 2002 hingga perundingan akhir pada tahun 2004 dalam sebuah forum negosiasi di Wellington, New Zealand. Dalam forum yang diadakan pada bulan Juli 2004 ini, Brunei Darussalam ikut hadir sebagai negara pengamat, yang setahun kemudian ikut bergabung dan mendeklarasikan kesediaannya menjadi negara pelopor Perjanjian Kemitraan TPSEP, bersama Singapura, Chili, dan Selandia Baru. Deklarasi mengenai Perjanjian Kemitraan TPSEP

akhirnya diumumkan pada saat pertemuan menteri perdagangan dalam forum APEC tahun 2005 di Korea Selatan (Elms, 2012, hlm. 5).

Setelah masa transisi kepemimpinan dari Presiden George W. Bush yang kemudian beralih pada kepemimpinan Presiden Barack Obama, Amerika Serikat kemudian memutuskan keikutsertaannya sebagai negara anggota TPSEP, namun dengan beberapa pembaharuan dalam regulasi kerjasama, seperti tarif pajak ekspor dan impor, pengaturan hak kekayaan intelektual, serta penekanan terhadap regulasi domestik negara anggota yang dapat berubah mengikuti regulasi utama dalam TPSEP (Gurtov, 2015). Oleh karena perubahan beberapa regulasi, maka TPSEP pun kemudian berganti nama menjadi Kerja Sama Trans Pasifik (*Trans Pacific Partnership- TPP*) pada tahun 2008.

Keanggotaan Amerika Serikat tidak hanya mengubah regulasi dan nama bagi TPSEP, namun juga menjadi magnet bagi negara lain untuk ikut bergabung dalam TPP. Hingga pada tahun 2015, Amerika Serikat berhasil meyakinkan Australia, Peru, Vietnam, Kanada, Meksiko, dan khusus Jepang pada tahun 2016 untuk ikut mensukseskan TPP yang kemudian beranggotakan 12 negara (Gurtov, 2015). Meskipun pada awalnya TPP didirikan oleh Singapura, Selandia Baru, Chili, dan Brunei Darussalam, namun Amerika Serikat bersama dua negara besar koalisinya yaitu Jepang dan Australia mampu memasarkan Kemitraan Trans Pasifik menjadi kerja sama perdagangan bebas yang beskala tinggi bagi kemitraan negara-negara anggota, termasuk didalamnya mengatur sejumlah hak cipta dan paten, standardisasi ketenagakerjaan, serta lingkungan (Elms, 2012, hlm. 10). Sehingga dalam periode 2013 hingga 2015 merupakan masa promosi TPP kepada dunia,

khususnya forum kerja sama APEC, sebagai alternatif perjanjian kemitraan yang berkembang dan menjanjikan bagi semua negara dengan prinsip keterbukaan.

Akan tetapi, stabilitas peran dari perjanjian kemitraan ini mulai diragukan sejak keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan tetap pada awal tahun 2017 dibawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat sebagai penggerak utama dalam liberalisasi perdagangan global negara-negara di kawasan Asia Pasifik kini mulai mencanangkan kebijakan baru, yaitu *America first*, dimana kemitraan yang berbasis multilateral dengan negara lain akan sangat sulit diwujudkan dibandingkan dengan kerjasama bilateral (British Broadcasting Corporation, 2017).

Proteksionisme yang dilakukan Amerika Serikat secara signifikan menurunkan persentase keuntungan dari negara-negara anggota serta menutup kemungkinan adanya keikutsertaan negara-negara Asia, seperti Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan, dalam keanggotaan TPP (Sposato, 2017). Peran Amerika Serikat yang begitu besar dalam Perjanjian Kemitraan TPP didasarkan pada kekuataannya dalam membangun pembukaan pasar yang didasari pada reformasi sektor ekonomi (Takenaka, 2016). Perjanjian Kemitraan TPP memberikan ruang lebih luas berupa akses perdagangan kepada negara-negara berkembang terhadap pasar Amerika Serikat, Jepang dan Australia.

Kepercayaan internasional terhadap efektifitas TPP juga semakin memburuk dikarenakan banyaknya kritik dari para akademisi dan ekonom domestik di berbagai negara, setelah dokumen perjanjian TPP di terbitkan oleh wikileaks. Kritik terbesar terhadap TPP adalah bentuk perjanjian itu sendiri yang mengandung tiga unsur

kuat praktik neoliberalisme, yaitu perdagangan bebas barang dan jasa, sirkulasi bebas kapital, serta kebebasan dalam berinvestasi (Guardian, 2015). Opini publik mengenai buruknya reputasi TPP sudah banyak beredar baik dalam tingkat nasional maupun internasional, yang menyebabkan kondisi TPP pasca pengunduran keanggotaan tetap oleh Amerika Serikat menjadi semakin tidak stabil dengan adanya isu mengenai praktik neoliberal yang memposisikan investor dari berbagai korporasi besar di atas kepentingan masyarakat dan negara (Guardian, 2015).

Namun keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan serta polemik opini publik yang berkembang mengenai buruknya sistem Kemitraan Trans Pasifik tidak mengubah niat Jepang, untuk tetap menaruh kepercayaan yang besar bagi potensi kerja sama yang diawali oleh perjanjian dagang awal Kemitraan Ekonomi Strategis Trans-Pasifik. Jepang kemudian menetapkan perumusan baru dari perjanjian kemitraan regional berbasis ekonomi TPP ini menjadi *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership* (CPTPP), dengan meyakinkan pemerintah Australia dan Kanada. Perumusan baru ini juga disetujui oleh sepuluh negara anggota lainnya pada Maret 2018, dengan penambahan pasal yang mempertimbangkan pengajuan hak personal dari tiap perusahaan dalam negara-negara anggota untuk mengatur dan menentukan kebijakan secara mandiri (Mulgan, 2017).

Perdana Menteri Shinzo Abe mengakui akan ada penurunan angka dalam target TPP sejak keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan, begitu juga dengan angka antusiasme negara-negara di Asia untuk bergabung (Takenaka, 2016). Akan tetapi perumusan CPTPP yang bersifat lebih kooperatif terhadap keinginan

negara- negara anggota terutama dalam kebijakan hak personal perusahaan, diperkirakan akan mampu menarik beberapa negara di Asia terutama Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan. Perdana Menteri Shinzo Abe yakin rencana keikutsertaan ketiga negara tersebut dalam CPTPP akan direalisasikan mengingat faktor pendapatan riil ketiganya akan meningkat secara signifikan setelah bergabung dengan pakta ini, dimana berisi akses yang besar bagi perdagangan dengan negara- negara yang memiliki basis perdagangan yang kuat (Sposato, 2017).

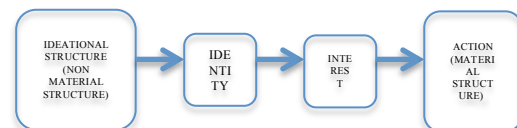
KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam memberikan jawaban terhadap rumusan masalah menggunakan pertanyaan mengapa, maka penulis akan menggunakan konsep konstruktivisme secara umum dengan detil pemikiran Alexander E. Wendt dan Nicholas Onuf. Konstruktivis menggunakan dasar *inter- subjective* (antar-subjek), norma, agen sosial, dan pengembangan identitas secara timbal balik dalam setiap pendekatannya memahami fenomena sosial yang terjadi di lingkungan internasional (Hadiwinata, 2017, hlm. 264). Sehingga suatu tindakan dalam menyikapi fenomena dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan konteks tertentu walaupun dilakukan oleh aktor global yang sama dalam kurun waktu berbeda, dikarenakan mendapat pengaruh oleh kepentingan, norma, identitas budaya, dan simbol- simbol linguistik (Fierke, 2013, hlm. 189).

Hal ini menekankan bahwa setiap tindakan sebuah negara maupun aktor global lainnya tidaklah bersifat kaku dan monoton, melainkan bersifat multi bentuk sesuai dengan konteks tertentu, dalam hal ini berupa kepentingan dan identitas yang didasari struktur ide berdasarkan hasil konstruksi sosial dari kultur tempat bangsa bertumbuh.

Sehingga untuk memahami sikap Jepang yang kemudian berinisiatif menjadi *leader* dalam perumusan CPTPP pasca pengunduran Amerika Serikat dari keanggotaan, perlu ditinjau dari prinsip utama pendekatan konstruktivis dimana non material struktur mempengaruhi material struktur.

Menurut Alexander E. Wendt, struktur non material berupa ideasional itu memiliki fungsi yang lebih penting karena mampu membentuk identitas dan kepentingan aktor global, seperti negara dan organisasi internasional (Wendt, 1987, hlm. 354-357). Sehingga karakter tindakan (struktur) suatu negara tidak ditentukan oleh unsur material berupa kekuatan ekonomi dan militer saja, melainkan lebih ditentukan oleh unsur budaya setiap negara yang terbentuk melalui interaksi antar- subjek, baik dari dalam maupun luar negerinya. Penjelasan berikut dapat digambarkan melalui model pembentukan kebijakan menurut Alexander E. Wendt di bawah ini:



Gambar 1: Model Pembentukan Kebijakan Wendt.

Maka ketika sebuah negara dijadikan sebagai unit analisa, *state-system* yang bersifat *intersubjective* menurut Wendt, harus mendapat perhatian khusus atas dasar identitas dan kepentingan yang dibangun dalam konteks sosial. Jika terdapat perubahan *action* dari sebuah negara, dalam hal ini keputusan Jepang untuk tetap menjadi anggota dari TPP setelah keluarnya Amerika Serikat, maka terdapat juga perubahan identitas yang berasal dari ide, nilai, norma dan prinsip (*ideational structure*) terhadap perubahan *interest*. Struktur ide ini

bersifat sangat personal dan berbasis budaya karena melalui proses belajar yang terbentuk melalui interaksi antar-subjek dalam ruang lingkup lingkungan dimana manusia (agen) tumbuh, sehingga pembentukan struktur non material ini bersifat dinamis mengikuti pola adaptasi dari agen terhadap lingkungannya (Hadiwinata, 2017, hlm. 274- 276).

Dalam dunia internasional terdapat berbagai rezim (struktur) yang terjadi, namun menurut Wendt rezim ini adalah struktur yang tidak terjadi begitu saja dan bersifat dapat diubah sesuai dengan keinginan agennya. Selama sebuah struktur itu masih dianggap memiliki nilai yang baik sesuai dengan struktur ide agen, maka rezim tersebut akan tetap dipertahankan. Karna proses penciptaan struktur ini menyerupai pola penciptaan kebiasaan, seperti ungkapan seorang reporter internasional ternama yang mengamati pola kebiasaan manusia, Charles Duhigg: “*At the first you make a habit, and at the end habit makes you*” (Duhigg, 2013, hlm. 18-19). Pandangan ini juga diperkuat oleh pendapat Christian Reus- Smit yang meyakini adanya hubungan timbal balik antara agen dan struktur, dimana proses pembelajaran norma dan nilai budaya membentuk identitas yang nantinya akan memaksa aktor untuk membentuk sebuah struktur (Reus-Smit, 2005, hlm. 197). Selama struktur ini masih dianggap sesuai dengan identitas setelah melewati proses sosialisasi dari lingkungan, maka struktur tersebut yang nantinya akan semakin memperkuat identitas awal.

Setelah mengalami kekalahan pada Perang Dunia II, Jepang secara *de facto* menyerahkan kekuatan militernya kepada Amerika Serikat dan membangun kembali perekonomian nasional selama masa pemulihan. Dalam perkembangannya Jepang

menjadi negara dengan tipikal US-Centris, dimana aliansi utama, pembela, dan mitra dagang berporos pada kebijakan Amerika Serikat (Takashi & Jain, 2000, hlm. xii). Hal ini yang memperlihatkan kecenderungan kebijakan Jepang yang pada mulanya isolasionisme sebelum Perang Dunia II, kini menjadi internasionalisme yang memiliki pandangan negara ideal dalam dunia internasional adalah negara yang memiliki kapasitas ekonomi yang kuat dan mempertahankan aliansi dengan Amerika Serikat untuk memperkuat keamanan. Namun identitas ini berubah ketika Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Donald Trump, keluar dari keanggotaan TPP yang semula merupakan promotor dalam kemitraan Trans Pasifik tersebut. Jepang tidak lagi mengikuti jejak langkah kebijakan Amerika Serikat, bahkan menginisiasi untuk merekonstruksi TPP menjadi CPTPP.

Perubahan identitas Jepang ini dapat dijelaskan melalui konstruksi nilai, norma, prinsip, dan aspek historis (struktur ide) bangsa Jepang. Struktur ide ini dapat berubah karena menimbulkan efek regulatif dan konstitutif yang dapat mendorong Jepang untuk terus memperbarui definisi identitas dan kepentingannya sesuai dengan konstruksi struktur ide awal yang lebih melekat padanya. Setelah mengalami kekalahan pada Perang Dunia II dan kemudian mendapatkan krisis kepercayaan internasional sebagai *economic animal* pada masa kepemimpinan PM Takuei Tanaka, Jepang mulai melakukan proses sosialisasi dan pembelajaran tentang norma dan nilai baru dalam pergaulan internasional yang dikembangkan melalui rezim internasional mengenai keberhasilan multilateralisme melalui perdagangan bebas dalam menjaga reputasi negara di mata dunia (Eiji, 2007).

Sehingga identitas yang semula mengikuti arah kebijakan Amerika Serikat terutama dalam sektor ekonomi, kemudian berubah menjadi tidak mendukung unilateralisme Amerika Serikat oleh Donald Trump dan menjadi *leader* bagi pembentukan CPTPP. Perubahan kondisi internasional berupa keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan TPP juga mempengaruhi arah perubahan kepentingan Jepang dalam perjanjian kemitraan TPP, yang awalnya hanya melakukan tindakan perekonomian yang sesuai dengan kepentingan nasional Amerika Serikat, berubah menjadi nasionalisme ekonomi berupa peningkatan ekspor terhadap negara-negara anggota yang masih tersisa dan non anggota dari seluruh kawasan untuk menjaga keseimbangan perdagangan Jepang.

Kepentingan ekonomi tersebut juga diiringi dengan kepentingan politik berupa peningkatan peran dalam kawasan Asia Pasifik. Perubahan terhadap identitas dan kepentingan tersebut dapat dikaji melalui struktur ide Jepang yang memandang perdagangan bebas multilateralisme sebagai sumber perekonomian domestik dan peningkatan peran global. Struktur ide ini dibentuk dari aspek historis Jepang yang meraih keberhasilan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi pasca kekalahannya oleh Sekutu dan perkembangan nilai dan norma melalui perdagangan bebas (Ohmae, 1987, hlm. 112).

PEMBAHASAN

Setelah keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan TPP, Jepang kemudian menginisiasi pertemuan dengan sepuluh negara anggota yang masih tersisa untuk kemudian merumuskan bentuk kemitraan yang baru berupa perjanjian kerja sama CPTPP pada tahun 2018. Sikap ini merupakan langkah yang diambil di

luar dari kebiasaan Jepang sejak era pasca Perang Dingin, dimana Jepang seringkali menjadi negara kedua di bawah Amerika Serikat dalam setiap forum maupun kemitraan internasional. Sehingga dengan memakai landasan teori konstruktivisme oleh pemikiran Alexander E. Wendt dan Nicholas Onuf, fenomena irasional tersebut dapat dijelaskan melalui penggambaran struktur ide perdagangan bebas yang mampu mempengaruhi perubahan identitas dan kepentingan Jepang dalam kawasan Asia Pasifik melalui kemitraan CPTPP.

Struktur Ide Perdagangan Bebas

Struktur ide yang paling tepat dalam menjelaskan keputusan Jepang untuk tetap menjadi anggota TPP dan berinisiatif untuk menjadi *leader* dalam perumusan kemitraan perdagangan bebas multilateral yang baru adalah mengenai struktur ide Jepang berupa perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan sebuah perdagangan yang dilakukan antar negara tanpa adanya hambatan domestik, seperti pajak masuk, kuota impor, dan subsidi produk dalam negeri.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, struktur ide dihasilkan dari proses belajar terhadap lingkungannya dimana ia tumbuh. Struktur ide tentang perdagangan bebas juga didapat oleh bangsa Jepang juga hasil dari sosialisasi dengan masyarakat dalam negeri dan juga masyarakat internasional. Untuk pertama kalinya Jepang mengerti arti pentingnya sebuah perdagangan bebas dari ancaman Commodore Perry pada tahun 1853 dengan instrumen perang persenjataan lengkap dan '*black ships*'. Masyarakat Jepang terutama para kelompok pebisnis memaksa pemerintahan untuk segera mengubah kebijakan *sakoku* menjadi lebih terbuka. Awalnya hanya untuk

menyelamatkan bangsa agar tidak diserang dan dijajah seperti bangsa Asia lainnya, akan tetapi semakin hari Jepang jadi belajar arti pentingnya membuka diri bagi negara lain untuk menciptakan peluang dari hubungan simbiosis mutualisme.

Dari peristiwa tersebut Jepang memahami bagaimana potensi bahan baku melimpah yang mereka miliki ternyata bernilai bagi negara lain dan mampu untuk dipasarkan. Tidak hanya itu, setelah mengalami keuntungan dari perdagangan pabrik dan galangan kapal yang dijual murah terhadap swasta pada era Restorasi Meiji, Jepang juga mempelajari bahwa negaranya tidak hanya memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun juga sumber daya manusia yang produktif. Pada saat itu banyak bahan baku yang dapat bangsa Jepang olah menjadi bahan siap pakai yang bernilai jauh lebih tinggi dari bahan mentah tadi. Sehingga dengan biaya produksi yang kecil, bangsa Jepang mampu mengubah bahan mentah menjadi bahan yang memiliki harga jual tinggi di pasaran. Hal ini juga yang menyebabkan adanya keajaiban perekonomian Jepang pada tahun 1960-1970 an dalam memulihkan perekonomian pasca kealahannya dalam Perang Dunia II (Eiji, 2007).

Dalam konteks Jepang, struktur ide tentang perdagangan bebas dapat dikategorikan sebagai struktur dan negara bangsa Jepang adalah agen. Sebagaimana pendapat Wendt yang mengatakan bahwa terdapat hubungan timbal balik yang saling menguatkan antara struktur dan agen, maka pada awal kedatangan ancaman Comodor Perry tahun 1853 yang menjadi ancaman bagi Jepang dan memaksanya untuk membuka diri dan melakukan praktik perdagangan bebas, berubah menjadi sebuah kebiasaan yang telah terstruktur dalam perkembangan

masyarakat Jepang. Karena dalam proses belajarnya, perdagangan bebas lebih banyak mendatangkan keuntungan dan keberhasilan dalam mengatasi permasalahan ekonomi dalam negeri Jepang. Perdagangan bebas menjadi suatu ide yang dianggap benar dalam mendatangkan profit bagi perekonomian negara. Oleh sebab itu, seiring berjalannya waktu perdagangan bebas dijadikan sebagai *trade mark* dalam menentukan kebijakan luar negerinya.

Dalam pengambilan keputusan di Jepang terdapat tradisi yang mengikutsertakan pertimbangan kelompok pebisnis dalam pengambilan keputusan terutama terkait perekonomian negara. Kelompok pebisnis memiliki porsi yang sangat krusial, bahkan lebih besar dari badan eksekutif dan badan legislatif, dalam memberikan pengaruhnya terhadap pembuatan kebijakan dikarenakan subjek dan sekaligus objek yang merasakan langsung dari dampak kebijakan ekonomi adalah golongan ini (Takashi & Jain, 2000, hlm. 13). Selain disebabkan oleh suara yang diberikan pada calon legislatif dalam pemilihan sebagian besar berasal dari kelompok pebisnis, tradisi ini juga dikarenakan kelompok pebisnis merupakan tokoh penting untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan perekonomian Jepang.

Pada era Restorasi Meiji, kelompok pebisnis lah yang meyakinkan masyarakat dan pemerintah Jepang untuk membuka diri terhadap perdagangan dengan negara lain, terutama dari Inggris dan Amerika Serikat (Tjeng, 1983, hlm. 349). Kelompok pebisnis membuat aliansi untuk mendesak pemerintah Jepang berganti menjadi kekaisaran kembali dan meningkatkan kemakmuran bangsa dengan menjalankan kebijakan luar negeri perdagangan bebas. Setelah

pemerintah memutuskan untuk mengubah arah kebijakan menjadi terbuka, kelompok pebisnis pula yang mampu menyelaraskan keinginan masyarakat dengan pemerintah dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung serta berpartisipasi aktif terhadap pembangunan perekonomian negara yang pada saat itu mengalami perubahan drastis akibat ancaman dari negara Barat (Tjeng, 1983, hlm. 350).

Oleh sebab itu hingga saat ini Jepang masih memberikan tempat yang sangat spesial bagi pemikiran kelompok pebisnis terhadap penentuan kebijakan nasional maupun internasional. Kelompok pebisnis terbagi menjadi dua, yaitu *gyokai* (*sectoral world*) dan *zaikai* (*bussiness world*) (Takashi & Jain, 2000, hlm. 14). *Gyokai* merupakan kelompok pebisnis yang bergerak dalam sektor industri dan kepentingan lain berdasarkan sektor, seperti sektor pertanian. Sedangkan *zaikai* merupakan organisasi induk di kalangan bisnis komersial dan dibagi menjadi empat kelompok perusahaan-perusahaan besar. Selain kelompok pebisnis tersebut, terdapat kelompok pebisnis swasta yang paling berpengaruh di Jepang, yang bernama kelompok *keiretsuka* (Takashi & Jain, 2000, hlm. 14). Kelompok *keiretsuka* adalah sejenis korporasi multinasional yang memiliki cabang di berbagai wilayah. *Keiretsuka* memiliki pengaruh yang sangat besar terutama dalam memberikan pendapatnya terhadap *decision making process* Jepang di bidang industri dan bisnis. Dikarenakan pengaruhnya pada suprastruktur politik dalam pengambilan keputusan, maka *keiretsuka* dapat juga berperan sebagai kelompok penekan.

Berkaitan dengan pembahasan kelompok penekan, salah satu kelompok pebisnis *zaikai*, yaitu *keidanren* (*Federation of Economic*

Organisation) merupakan pendonor utama dalam pendanaan partai politik besar *Liberal Democratic Party* (LDP). Sedangkan posisi partai LDP dalam konstitusi Jepang termasuk krusial, yaitu sebagai partai politik yang paling berpengaruh dalam Diet atau Parlemen Nasional yang merupakan satu-satunya organ pembuat hukum (Takashi & Jain, 2000, hlm. 11). Sehingga jika partai politik LDP tidak mengakomodasikan kepentingan dari kelompok pebisnis dalam menjalankan kebijakan perdagangan bebas, maka finansial partai akan terganggu dan suara dalam pemilihan selanjutnya akan sangat berisiko.

Selain kelompok pebisnis, birokrasi Jepang juga memiliki keistimewaan dalam pengambilan keputusan terutama jika berkaitan dengan kebijakan perekonomian. Birokrasi Jepang terdiri dari 14 menteri negara yang membantu Perdana Menteri dalam badan eksekutif (Takashi & Jain, 2000, hlm. 8). Akan tetapi salah satu menteri yang paling mendominasi dalam pengambilan kebijakan adalah Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (*Ministry on Economic, Trade, and Industry*). Dalam menjalankan fungsinya birokrasi bekerja berdasarkan sistem *tatewari gyosei* (*vertically divided administration*), dimana dalam mengurus urusan yang bersifat teknis masing-masing lembaga kementerian diberi kebebasan untuk bertindak sendiri-sendiri (Takashi & Jain, 2000, hlm. 8). Sehingga ketika Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri menyetujui keanggotaan Jepang dalam sebuah kemitraan perdagangan bebas multilateral, dan jika hal tersebut tidak begitu menyenangkan bagi Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, maka hal tersebut akan tetap berjalan berdasarkan sistem *tatewari gyosei*.

Kemudian dalam penjelasan lanjut, Wendt berpendapat bahwa struktur ide

dapat berubah sewaktu- waktu sesuai dengan kondisi lingkungan. Ketika Jepang yang merupakan *'little brother'* Amerika Serikat dalam mengikuti sebuah kemitraan perdagangan bebas di Asia Pasifik, kemudian mengambil langkah menjadi *leader* dalam perumusan CPTPP setelah keluarnya Amerika Serikat dari TPP tahun 2017. Maka fenomena tersebut menggambarkan adanya perubahan nilai terhadap struktur ide *'little brother'* Amerika Serikat yang menjadikan Jepang cenderung bertindak pasif dan reaktif dalam kawasan Asia Pasifik. Ketika keputusan Presiden Donald Trump untuk melakukan kebijakan proteksionisme dalam pergaulan internasional, merupakan sesuatu yang bertolak belakang dengan struktur ide perdagangan bebas Jepang, maka ia mengambil sikap lain yaitu dengan menjadi leader dalam kemitraan TPP. Keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan TPP memberikan peluang bagi Jepang untuk menciptakan pasar bebas di Asia Pasifik yang sesuai dengan kepentingan Jepang. Struktur ide *follower* Amerika Serikat yang cenderung menjadikan Jepang sebagai negara pasif dan reaktif dalam kawasan Asia Pasifik kemudian berganti menjadi sikap yang positif dan proaktif dalam menjalankan nasionalisme ekonominya. Hal ini disebabkan oleh struktur ide perdagangan bebas merupakan struktur domestik yang lebih normatif jika dibandingkan dengan ide *'little brother'* Amerika Serikat.

Identitas

Setelah mengetahui betapa besarnya pengaruh struktur ide perdagangan bebas yang dimiliki Jepang terhadap perubahan sikapnya untuk tidak mengikuti pola kebijakan proteksionisme Amerika Serikat terhadap kemitraan TPP, maka tahapan selanjutnya adalah penjabaran identitas

baru dari pengaruh struktur ide yang dimiliki Jepang terhadap kawasan Asia Pasifik. Jepang tidak hanya menunjukkan sikap penolakan terhadap kebijakan proteksionisme oleh Amerika Serikat, namun juga memilih langkah inisiatif dalam menunjukkan kemampuannya sebagai *leader* dari perumusan kemitraan TPP yang baru.

Pada bulan Januari 2017, setelah terpilihnya Presiden Donald Trump sebagai pemimpin baru Amerika Serikat, ia mengumumkan secara resmi keluarnya Amerika Serikat dari kemitraan TPP dengan alasan perlindungan tenaga kerja domestik (Cable News Network, 2017). Keluarnya Amerika Serikat menimbulkan skeptis yang luar biasa dari para pakar ekonomi dunia terhadap keberhasilan TPP. Selain dari menurunnya jumlah keuntungan bagi negara- negara anggota, TPP juga sudah mendapat kecaman dunia setelah penerbitan ilegal oleh *wikileaks* mengenai data regulasi kemitraan TPP yang sangat merugikan tenaga kerja nasional (Takenaka, 2016). Kemitraan TPP menjadi tidak menarik lagi bagi negara- negara Asia yang juga tergabung dalam forum kerja sama APEC untuk bergabung dengan TPP. Masyarakat domestik negara- negara anggota juga mendukung tindakan negaranya untuk mengikuti langkah Presiden Donald Trump dikarenakan tidak adanya keberpihakan TPP terhadap kemakmuran pengusaha kecil domestik (Guardian, 2015).

Di tengah situasi internasional yang rumit terhadap penerimaan TPP, Jepang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe mengambil sikap untuk tetap mempertahankan keanggotaannya dan mencoba mengadakan pertemuan dengan sepuluh negara anggota lainnya untuk menindaklanjuti TPP (Mulgan, 2017). Sebelas negara kemudian bertemu dalam KTT APEC di Vietnam

pada November 2017 dan menghasilkan keputusan untuk tetap mempertahankan status anggotanya dan merumuskan kembali TPP menjadi sebuah kemitraan yang dapat menjawab berbagai tantangan globalisasi dan memperhatikan hak tenaga kerja lokal (Sposato, 2017).

Perumusan perjanjian yang baru dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan setelah pertemuan pertama sebelas negara anggota pasca keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan. Perumusan ini ditandatangani di Tokyo dengan nama yang baru yaitu *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership* (CPTPP) oleh Jepang, Australia, Selandia Baru, Kanada, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Chili, Peru, dan Meksiko (Funabashi, 2018). Selanjutnya perjanjian CPTPP memasuki tahapan baru yaitu pengesahan dengan penandatanganan dari semua negara anggota yang diwakili oleh kementerian negara di Santiago pada tanggal 8 Maret 2018 (McDonald, 2018). Untuk memperlihatkan konsistensinya sebagai *leader* dalam kemitraan CPTPP, maka pada bulan Juli 2018 Jepang meratifikasi perjanjian tersebut setelah ratifikasi pertama dilakukan oleh Meksiko sebulan setelah penandatanganan di Chili (Funabashi, 2018).

Dalam perumusan kemitraan Asia Pasifik yang baru, Jepang mengatur beberapa regulasi yang sudah mengalami pembaharuan di dalam CPTPP untuk meyakinkan sepuluh negara anggota akan keberhasilan perjanjian tersebut. Perubahan regulasi ini juga diharapkan dapat mengakomodir keraguan negara-negara non anggota untuk bergabung serta meyakinkan masyarakat internasional bahwa kemitraan Asia Pasifik kini telah ramah akan tenaga kerja lokal. Perubahan regulasi dalam

CPTPP membahas topik berbagai masalah pemotongan tarif dan hambatan non tarif, ketenagakerjaan, lingkungan, hak asasi manusia, hak kekayaan intelektual (Eunseo, 2018). Menurut Menteri Negara untuk Kebijakan Ekonomi dan Fiskal, Toshimitsu Motegi, perjanjian CPTPP akan mulai diberlakukan pada tanggal 30 Desember mendatang, dikarenakan perubahan peraturan ini menyangkut segala aspek dalam kebijakan nasional, maka masih membutuhkan waktu bagi tiap negara anggota untuk meratifikasinya (Eunseo, 2018).

Untuk menunggu masa ratifikasi dari beberapa negara anggota, Perdana Menteri Shinzo Abe melakukan berbagai pendekatan kerja sama bilateral kepada beberapa negara dengan memberikan tawaran untuk bergabung dengan CPTPP (Funabashi, 2018). Perjanjian CPTPP merupakan sebuah kemitraan besar perdagangan bebas multilateral pertama yang sudah disepakati dan memiliki regulasi yang jelas serta transparan dalam menjawab tantangan globalisasi abad ke- 21. Setelah keberhasilannya dalam mengarahkan sepuluh negara anggota TPP yang tersisa untuk menyepakati perjanjian baru CPTPP, Jepang menjadi negara yang memiliki kapabilitas baru dalam memperlihatkan kepemimpinannya dalam kawasan Asia- Pasifik (Eunseo, 2018).

Setelah membuktikan kemampuannya dalam memanfaatkan multilateralisme strategis dari CPTPP, Jepang mampu menarik ketertarikan China dalam membentuk rezim perekonomian yang setara tanpa keterlibatan WTO (*World Trade Organization*) (Eunseo, 2018). Prediksi para pakar ekonomi terhadap ketidakstabilan kawasan Asia pasifik pasca kebijakan proteksionisme Amerika Serikat kini dapat terbantahkan dengan adanya kemungkinan China untuk bergabung

dengan CPTPP (Eunseo, 2018). Tidak hanya itu, regulasi dalam CPTPP yang sudah disepakati juga mampu dijadikan sebagai *role model* dalam *framework* pembuatan perjanjian multilateral lain termasuk Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (*Regional Comprehensive Economic Partnership- RCEP*) yang dipimpin ASEAN, memperkuat dampak Jepang pada negosiasi RCEP sebagai penasihat (Eunseo, 2018).

Jepang juga berhasil membuat kesepakatan dengan Uni Eropa dalam perjanjian EU- Japan EPA (*Economic Partnership Agreement*) pada bulan Juli 2018 (Eunseo, 2018). Perjanjian ini merupakan bentuk penolakan antara dua partner dagang besar Amerika Serikat terhadap kebijakan proteksionisme Presiden Donald Trump. Perjanjian CPTPP dapat digunakan Jepang sebagai bentuk dari realisasi kekuatan ekonomi dan diplomasi di kawasan Asia Pasifik. Dengan statusnya sebagai *leader* dalam kemitraan CPTPP, Jepang berusaha untuk memperluas jangkauan pertumbuhannya hingga ke beberapa negara yang sebelumnya tidak menjalin kerja sama secara intens. Dan melalui CPTPP, Jepang dapat mencapai target jumlah investasi luar negeri langsung (*Foreign Direct Investment*) pada tahun 2020 (Eunseo, 2018).

Keuntungan

Dalam penggambaran identitas sebelumnya, Jepang berinisiasi secara tanggap untuk menjadi pemimpin dalam perumusan kemitraan kawasan Asia Pasifik yang baru. Kemitraan ini tidak hanya mencakup penghapusan tarif dan non tarif saja, tetapi juga berbagai bidang seperti investasi, perdagangan jasa, hak kekayaan intelektual, perusahaan milik negara dan perdagangan elektronik. Perjanjian ini akan menjadi dasar bagi perusahaan Jepang untuk membangun rantai nilai

yang maju dan memberikan kontribusi mencolok terhadap pertumbuhan ekonomi Jepang (Sposato, 2017). Sehingga seluruh parlemen Jepang berupaya maksimal untuk menyelesaikan prosedur yang diperlukan dalam penandatanganan dan pemberlakuan CPTPP sesegera mungkin untuk memenuhi harapan yang tinggi dari industri Jepang.

Menurut Kim Eunseo, seorang peneliti dari lembaga penelitian *Stimson Center's Japan Program*, Jepang adalah sebuah negara yang akan menerima banyak sekali keuntungan dari perjanjian CPTPP, baik domestik maupun internasional. Dalam dunia internasional perjanjian CPTPP merupakan satu- satunya perjanjian kemitraan multilateral kawasan yang telah disepakati oleh sebelas negara anggotanya dalam membuat regulasi baru mengenai ketenagakerjaan, pertimbangan terhadap pelestarian lingkungan, dan juga kekayaan hak intelektual. Sehingga sebagai perjanjian yang sudah disepakati dengan aturan yang mengikuti standar internasional, perjanjian tersebut akan menjadi tolak ukur dalam menentukan aturan bagi perdagangan multilateral kawasan yang sejenis, seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* di ASEAN (Eunseo, 2018).

Hal ini tentu saja akan memperkuat posisi Jepang pada negosiasi perjanjian kawasan serupa terutama RCEP di ASEAN. Bahkan dalam sebuah wawancara dengan para wartawan setelah mengadakan pertemuan dengan sepuluh perwakilan negara anggota CPTPP di Tokyo, Menteri Revitalisasi Ekonomi Jepang Toshiimitsu Motegi, menegaskan peran Jepang dalam merealisasikan perjanjian CPTPP pada akhir tahun 2018. Ia mengatakan bahwa Jepang akan konsisten dalam mengambil peran utama untuk mengupayakan

realisasi kemitraan CPTPP secepat mungkin, setelah menerima laporan mengenai kondisi dalam negeri dari negara anggota (Asia Nikkei, 2018). Selain itu Menteri Motegi mengatakan secara eksplisit mengenai status kemitraan CPTPP untuk menciptakan arsitektur yang bebas dan adil berdasarkan aturan baru dan mengirimkan pesan kuat kepada dunia bahwa proteksionisme akan merugikan perekonomian nasional (Asia Nikkei, 2018). Oleh sebab itu, perjanjian CPTPP dapat dijadikan alat bagi Jepang untuk mendapatkan pengakuan global terhadap peran utamanya di kawasan Asia Pasifik setelah kebijakan proteksionisme Amerika Serikat.

Selain untuk memperlihatkan kemampuan Jepang dalam menunjukkan identitasnya dalam pergaulan ekonomi dan politik internasional, Jepang sedang berusaha untuk meningkatkan prospek pertumbuhannya (Eunseo, 2018). Prospek ini dapat dicapai melalui investasi secara langsung dan peningkatan sektor ekspor. Dengan gabungan GDP sebesar \$10 triliun dari anggota CPTPP, Jepang dapat menggandakan saham investasi langsungnya pada tahun 2020 yang sesuai dengan tujuan pemerintahan PM Shinzo Abe melalui kebijakan *abonomics* (Eunseo, 2018). Hal ini yang akan mempertahankan Jepang untuk meningkatkan peran utamanya dalam CPTPP pada peluang kerja, bakat asing dan inovasi baru.

Menurut data dari statistik perdagangan internasional PBB (*United Nations International Trade Statistic Database- UN Comtrade*), jumlah ekspor yang dilakukan Jepang ke berbagai benua lebih kecil jika dibandingkan dengan angka impor (UN- Comtrade, 2016). Data ekspor yang lebih besar hanya terdapat pada kawasan Amerika Utara sebesar 24%. Berikut daftar tabel ekspor dan impor

Jepang ke berbagai wilayah pada tahun 2016.

| Kawasan | Persentase Ekspor | Persentase Impor |
|---------------|-------------------|------------------|
| Asia | 56 | 61 |
| North America | 24 | 14 |
| Europe | 14 | 16 |
| Oceania | 2.8 | 5.2 |
| South America | 1.9 | 2.4 |
| Africa | 1.3 | 1.4 |

Tabel 4.1: Perbandingan Ekspor- Impor Jepang Tahun 2016

Sumber : UN- Comtrade 2016

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah ekspor Jepang masih relatif kecil jika dibandingkan dengan produk yang mereka impor dari luar negeri. Hal ini akan sangat mempengaruhi neraca perdagangan Jepang sehingga adanya kemitraan CPTPP dalam mewujudkan perdagangan bebas multilateralisme yang inovatif, diharapkan mampu memperluas pasar dan meningkatkan jumlah produk ekspor Jepang di berbagai kawasan. Selain data tersebut, terdapat pula akumulasi data dari jumlah ekspor dan impor Jepang terhadap negara- negara anggota CPTPP pada tahun 2016 untuk memperkuat hipotesa kepentingan peningkatan ekspor Jepang dalam keanggotaannya di CPTPP. Berikut merupakan data ekspor dan impor Jepang terhadap sepuluh negara anggota CPTPP.

| Negara | Persentase Ekspor | Komoditas | Persentase Impor | Komoditas |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Chili | 0.28 | Transportasi, mesin, produk mineral | 0.90 | Produk hewan, produk kayu, makanan |
| Peru | 0.15 | Transportasi, mesin, produk mineral | 0.28 | Metal, makanan, produk mineral |
| Selandia Baru | 0.36 | Metal, transportasi, mesin | 0.39 | Produk kimia, hewani, kayu |
| Australia | 2.1 | Transportasi, mesin, produk mineral | 4.7 | Produk hewani, makanan, mineral |
| Vietnam | 1.8 | Mesin, metal, produk kimia | 2.8 | Mesin, tekstil, pakaian |
| Malaysia | 1.8 | Mesin, transportasi, metal | 2.8 | Produk mineral, metal, kayu |
| Brunei Darussalam | 0.019 | Transportasi, mesin, metal | 0.28 | Produk mineral |
| Singapura | 2.8 | Mesin, transportasi, produk kimia | 1.4 | Produk mineral, metal, makanan |
| Kanada | 1.6 | Transportasi, mesin, metal | 1.5 | Produk mineral, hewani, kayu |
| Meksiko | 2.2 | Mesin, transportasi, metal | 0.94 | Produk mineral |

Tabel 4.2: Perbandingan Ekspor- Impor Jepang di Negara CPTPP Tahun 2016

Sumber : UN- Comtrade 2016

Pada pemaparan data pada tabel kedua, terlihat terdapat perbandingan yang cukup signifikan dari jumlah negara yang cenderung melakukan

impor kepada Jepang daripada ekspor Jepang terhadap sepuluh negara anggota tersebut. Jika diambil jumlah rata-rata perbandingan ekspor dan impor, maka dari sepuluh negara tersebut terdapat tujuh diantaranya yang mengalami jumlah ekspor jauh lebih kecil dua kali lipat dari jumlah impornya kepada Jepang. Hal ini memperlihatkan kurangnya intensitas kerjasama diantara kedua negara sehingga dengan adanya perjanjian kemitraan CPTPP, segala hambatan tarif dan non-tarif dapat dikurangi.

Jepang mengupayakan adanya keseimbangan perdagangan dengan negara-negara anggota CPTPP. Ia berusaha menciptakan prinsip saling ketergantungan akan kebutuhan produk dan pemecahan masalah regional masing-masing. Sehingga target aspek yang berusaha untuk dipenuhi tidak hanya berkisar pada nilai ekspor yang lebih murah dan perluasan pasar impor, akan tetapi juga memenuhi defisit dan surplus perdagangan internasional. Jenis komoditas yang dibutuhkan Jepang masih berkisar bahan mentah bagi industri seperti produk kayu dan mineral. Sedangkan pasar ekspor Jepang adalah barang-barang manufaktur seperti elektronik, mesin, dan transportasi (UN-Comtrade, 2016).

Perjanjian CPTPP yang berbasis perdagangan bebas multilateral tidak hanya menutup kerja sama dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik, namun juga membuka kesempatan keanggotaan bagi semua negara. Jepang merasa perlu membuka perluasan terutama bagi negara-negara yang memiliki perekonomian kurang stabil untuk membuka peluang lebih besar bagi pembuatan keseimbangan perdagangan dengan negara tersebut. Jepang juga mempertimbangkan kemungkinan adanya kenaikan impor dalam produksi produk bernilai tambah serta kemungkinan lainnya agar tidak

selalu mengandalkan bahan mentah, mengingat perdagangan bebas merupakan arus bebas pertukaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja.

KESIMPULAN

Jepang merupakan sebuah negara yang memiliki dua persepsi berbeda tentang dirinya sebelum dan sesudah Perang Dunia II. Sebelumnya Jepang beranggapan bahwa negara yang kuat adalah negara yang memiliki kekuatan militer yang besar, yang dikenal dengan *fukoku kyohei*. Akan tetapi setelah kekalahannya pada Perang Dunia II persepsi negara yang kuat berubah menjadi negara yang memiliki kapasitas ekonomi yang stabil, yang disebut dengan *fukoku kenzai*. Perekonomian tersebut kemudian direalisasikan dengan cara membuka diri dengan negara lain melalui perdagangan bebas. Diawali dengan ancaman oleh Commodore Perry tahun 1853, Jepang mulai membuka dirinya terhadap perdagangan bebas yang menghapuskan hambatan tarif.

Kedua persepsi mengenai negara ekonomi dan sistem terbuka perdagangan bebas ini sangat mempengaruhi pembentukan struktur ide yang Jepang miliki dalam memandang peranannya terhadap komunitas global. Jepang menjadikan perdagangan bebas sebagai bentuk pemenuhan kemakmuran negara dan ajang menunjukkan peranan globalnya. Struktur ide perdagangan bebas Jepang juga didukung oleh faktor internal dan eksternal mengenai paham globalisasi. Era globalisasi spontan mendesak tiap negara untuk jauh membuka diri terhadap kerja sama multilateral yang mampu membentuk rezim saling membutuhkan, sehingga mewujudkan kesejahteraan kolektif. Begitu juga halnya dengan opini publik yang berkembang dalam masyarakat Jepang untuk membentuk integrasi dalam memperlihatkan dan mempromosikan nilai-nilai regional yang dianggap baik

untuk kemudian diterapkan dalam kebudayaan universal. Globalisasi bukanlah bentuk hegemoni oleh satu negara, namun merupakan rezim untuk saling berbagi ilmu dan inovasi dalam menjalankan tanggung jawabnya menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.

Struktur ide perdagangan bebas inilah yang kemudian mempengaruhi pembentukan identitas baru Jepang yang dari sejak periode Restorasi Meiji memiliki kedekatan yang erat dengan Amerika Serikat, kemudian berubah menjadi aktif sebagai *leader* dalam kemitraan kawasan Asia Pasifik. Dalam peranannya sebagai *leader* dalam pembentukan perjanjian CPTPP, Jepang mampu memperlihatkan pada dunia tentang keberaniannya menjalankan nasionalisme ekonomi, tanpa pertolongan dari Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Jepang juga mengajak berbagai negara untuk bergabung dengan keanggotaan CPTPP sebagai bentuk penolakannya terhadap kebijakan proteksionisme Amerika Serikat yang dianggap tidak relevan dengan era globalisasi saat ini.

Tentu dalam pembentukan identitas yang baru, Jepang juga memiliki beberapa kepentingan. Salah satunya adalah kepentingan politik berupa peningkatan peran global dalam kawasan Asia Pasifik. Jepang selama ini selalu menjadi negara bayangan bagi Amerika Serikat dalam menentukan politik luar negerinya. Namun setelah keluarnya Amerika Serikat dari TPP, Jepang mendapatkan panggung sendiri untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa ia merupakan negara normal yang mampu menentukan kebijakan luar negerinya berdasarkan kepentingan nasional.

Melalui perekonstruksian TPP, Jepang ingin membuktikan bahwa globalisasi adalah era untuk mengadakan kerja sama multilateral

dan bukan sebuah upaya hegemoni oleh satu kekuatan *superpower*. Jepang ingin mendapatkan pengakuan dari dunia bahwa ia juga bisa menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan melalui kebutuhan integrasi dari seluruh negara.

Selain untuk memperluas jangkauan kebijakan politiknya dalam pergaulan internasional, Jepang juga menjadikan CPTPP sebagai kemitraan perdagangan bebas multilateral yang mampu meningkatkan ekspornya. Hal ini diupayakan Jepang mengingat dari data perdagangan yang dilakukan Jepang terutama terhadap negara-negara anggota CPTPP tidaklah seimbang, dimana jumlah impor terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah ekspor. Sehingga pembentukan pasar bebas yang telah mengalami pembaharuan regulasi yang lebih ramah terhadap ketenagakerjaan lokal ini mampu mengakomodasi berbagai permasalahan ekonomi negara maupun masyarakat internasional.

REFERENSI

- Tjeng, Lie T. (1983). *Studi Wilayah Pada Umumnya: Asia Timur Pada Khususnya*. Bandung: Penerbit Alumi.
- Ohmae, Kenichi. (1987). *Beyond National Borders: Reflections on Japan and The World*. US: Library of Congress.
- Akaha, T., & Langdon, F. (1993). *Japan and The Posthegemonic World*. US: Lynne Rienner Publishers.
- Takashi, I., & Jain, P. (2000). *Japanese Foreign Policy Today*. New York: Palgrave.
- Reus-Smit, Christian. (2005). *Theories of International Relations* Edisi Ketiga. London: Palgrave.
- Duhigg, Charles. (2013). *The Power of Habit*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Fierke, K.M. (2013). *International Relations Theories: Discipline*

- and Diversity Edisi Ketiga*. Oxford: Oxford University Press.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wendt, Alexander E. (2003). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Eiji, Oguma. (2007). *Postwar Japanese Intellectuals' Changing Perspective on Asia and Modernity*. Dalam Japan Focus, Vol. 5, Issue 2, February 2007. Diakses pada 5 Oktober 2018. The Asia-Pacific Journal.
- Elms, Deborah d. C. L. (2012). *The Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) Negotiations: Overview and Prospects*. No. 232, February 2012. Diakses pada 7 April 2018. Rajaratnam School of International Studies.
- Gurtov, Mel. (2015). *The Trans-Pacific Partnership: A Deeply Flawed Partnership*. Dalam Japan Focus, Vol. 13, Issue 20, May 2015. Diakses pada 12 Juli 2018. The Asia-Pacific Journal.
- Spetalnick, Matt. (2014). *Obama Says Momentum Building On 'Historic' Trans Pacific Trade Deal*. Diakses pada 3 Juli 2018. Dalam Website <https://www.reuters.com/article/us-china-apec-usa/obama-says-momentum-building-on-historic-trans-pacific-trade-deal-idUSKCN0IU0CW20141110>.
- Guardian. (2015). *Wikileaks release of TPP deal text stokes 'freedom of expression' fear*. Diakses pada 1 Juli 2018. Dalam Website <https://www.theguardian.com/business/2015/oct/09/wikileaks-releases-tpp-intellectual-property-rights-chapter>.
- Voice of America- indonesia. (2015). *Perdagangan Trans-Pacific Picu Ketertarikan, Kekhawatiran di Asia*. Diakses pada 10 September 2018. Dalam Website <https://www.voaindonesia.com/a/tpp-picu-ketertarikan-kekhawatiran-di-asia/2993272.html>.
- British Broadcasting Corporation. (2016). *Trans Pacific Partnership Trade Deal Signed in Auckland*. Diakses pada 10 September 2018. Dalam Website <https://www.bbc.com/news/business-35480600>.
- Vaswani, Karishma. (2016). *Asia's Winners and Losers from Trump's TPP Dump*. Diakses pada 5 Mei 2018. Dalam Website <https://www.bbc.com/news/business-38061616>.
- Takenaka, Kiyoshi. (2016). *Japan PM says TPP trade pact meaningless without U.S.* Diakses pada 7 April 2018. Dalam Website <https://www.reuters.com/article/us-japan-tpp-abe/japan-pm-says-tpp-trade-pact-meaningless-without-u-s-idUSKBN13G2IK>
- Mulgan, Aurelia G. (2017). *Shinzo Abe's Government Can't Afford to See The Trans-Pacific Partnership Fail*. Diakses pada 1 April 2018. Dalam Website <https://thediplomat.com/2017/11/japans-rush-to-conclude-tpp-11/>
- Sposato, William. (2017). *Abe Wants to Be the Last Free Trade*

- Samurai*. Diakses pada 3 April 2018. Dalam Website <http://foreignpolicy.com/2017/01/06/abe-wants-to-be-the-last-free-trade-samurai/>
- Cable News Network- indonesia. (2017). *Trump Bawa AS Resmi Keluar Dari TPP*. Diakses pada 5 April 2018. Dalam Website <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170124011942-134-188433/trump-bawa-as-resmi-keluar-dari-tpp>.
- Kertopati, Lesthia. (2017). *Donald Trump dan Bangkitnya Supremasi Kulit Putih di AS*. Diakses pada 10 April 2018. Dalam Website <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170815143251-134-234889/donald-trump-dan-bangkitnya-supremasi-kulit-putih-di-as>.
- Funabashi, Yoichi. (2018). *In America's Absence, Japan Takes The Lead On Asian Free Trade*. Diakses pada 5 April 2018. Dalam Website https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/02/22/in-americas-absence-japan-takes-the-lead-on-asian-free-trade/?noredirect=on&utm_term=.03bcc18f2fa7
- Mcdonald, Tim. (2018). *Asia-Pacific Trade Deal Signed By 11 Nations*. Diakses pada 10 April 2018. Dalam Website <https://www.bbc.com/news/business-43326314>
- Eunseo, Kim. (2018). *The CPTPP and Its Implications for Japan*. Diakses pada 10 Mei 2018. Dalam Website <https://thediplomat.com/2018/05/the-cptpp-and-its-implications-for-japan/>
- Asia Nikkei. (2018). *11 Member Trade Past Should Take Effect Early 2019: Japanese Minister*. Diakses pada 1 Desember 2018. Dalam Website <https://asia.nikkei.com/Economy/11-member-trade-pact-should-take-effect-early-2019-Japanese-minister2>.
https://japan.kantei.go.jp/97_abe/state-ment/index_e.html. Diakses pada 1 Juli 2018.
<https://www.japan.go.jp/abenomics/>. Diakses pada 1 Juli 2018.
<https://comtrade.un.org/>. Diakses pada 23 November 2018.